

ORANG MARIND DAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SAMKAI, MERAUKE

Bernardus Renwarin

Abstract: Significant touches of change have influenced the life of Marind people in general and in particular of Marind-anim people who live in the village of Buti, a subdistrict of Samkai. It has been happening since the early of the 20th century when the Dutch government and the Catholic Church had begun to establish themselves in Merauke area. After that time, since 1969 Indonesian policies of national development which periodically underwent by the program of PELITA (five-year development program) brought out various impact to the people both in positive and negative sense. A negative impact of the strong pressure of the development to the local people of Marind, particularly to those who are living in the village of Buti is the threat of their existence as Marind-Anim ha. Due to the case, this article is presented as a reflection using Buti people's lens to see the change and development that happened by the end of the 20th century which have been a part of their life that caused their moral depression as it has not fitted to their world view.

Keywords: *Samkai* • *Marind Anim-ha* • pembangunan • partisipasi • depresi moral •

Tulisan ini merupakan hasil studi lapangan tentang keadaan orang Marind dalam situasi yang terus berubah di Kelurahan Samkai. Tulisan ini juga berisi pembahasan tentang *world view* orang Marind yang didukung oleh kajian literatur dari sejumlah penulis tentang Marind. Naskah ini juga dilengkapi dengan kajian tentang partisipasi masyarakat serta pandangan orang Marind berkaitan dengan perubahan dan pembangunan yang sedang dialaminya. Studi ini dilakukan untuk menyelesaikan studi S2 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan menurut penulis masih relevan untuk diangkat kembali. Dikatakan demikian karena berdasarkan pengamatan serta bincang-bincang dengan sejumlah pihak di Merauke belum lama ini tampak situasi orang Marind Samkai¹ di Kampung Buti saat

¹Dari catatan R. J. Metary (1981: 1-2) diketahui bahwa kata *Samkai* (*Samkay*) adalah sebuah singkatan yang berasal dari "Sekolah *Amay Kombay*". Sekolah ini merupakan hasil dari cita-cita Pastor Verschueren, MSC berkaitan dengan sebuah konsep yang disebutnya *Mariend*

ini tidak banyak berbeda dengan situasi sekitar dua puluh tahun lalu. Bahkan dapat dikatakan keadaan saat ini memperlihatkan keadaan penduduk yang makin terpuruk dan terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, ada dua alasan yang mendorong penulis mengangkat kembali permasalahan ini. *Pertama*, relevansi permasalahan masa lalu orang Marind di Samkai dengan situasi saat ini. *Kedua*, bahan kajian ini belum pernah dipublikasikan. Untuk maksud tersebut penulisan kembali mengangkat hasil studi ini dilakukan dengan sejumlah revisi atas naskah yang pernah ditulis, khususnya berhubungan dengan kajian-kajian literatur.

Yang dimaksud dengan Marind Samkai di sini adalah komunitas orang Marind yang berdiam di Kelurahan Samkai Kecamatan Merauke (Baca: Distrik Merauke). Komunitas ini merupakan bagian dari suku Marind yang berada di wilayah Kabupaten Merauke, Papua, sekaligus juga merupakan penduduk asli setempat.² Di wilayah Kabupaten Merauke suku Marind dapat dijumpai di beberapa kecamatan yaitu Merauke, Okaba, Muting, dan Kimaam. Menurut beberapa informan penduduk setempat, *Marind-anim* berdiam di beberapa wilayah yang berbeda. Ada kelompok yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka biasanya disebut Marind pantai, ada juga yang berdiam di daerah berawa dan dikenal dengan nama Marind *Bob* serta ada yang hidup di daerah pedalaman pada dataran yang agak tinggi, jauh dari pantai, biasa disebut *Marind Deg*.

Kelurahan Samkai adalah suatu wilayah administrasi pemerintahan desa yang terdiri dari beberapa kampung, yaitu Nowari, Buti, Yowati, Yobar, dan Payum. Kampung-kampung ini merupakan kampung orang Marind. Namun sekarang kampung-kampung ini dihuni pula oleh suku-suku lain atau warga masyarakat non Marind. Menurut monografi Kelurahan Samkai tahun 1993/1994, penduduk kelurahan ini berjumlah 2200 jiwa. 45% dari jumlah tersebut adalah orang Marind, penduduk asli kelurahan ini, dan selebihnya adalah bukan orang Marind. Kelurahan Samkai terletak di tepi pantai sebelah barat Kota Merauke, merupakan sebuah daerah pinggiran Kota Merauke. Gambaran situasi penduduk yang demikian menimbulkan pertanyaan antara lain, bagaimana sesungguhnya

Plan. Menurut Meteray, pengertian lain dari *Samkai* ialah “jalan besar” yakni jalan “yang terbentang luas menuju ke masa depan”. Sekolah ini dimulai pada 29 Januari 1971 di Wendu, diikuti pertama kali oleh para Tua-tua Agama (Tuagama). Sekolah ini berlangsung sampai Januari 1981 dan ketika itu dibuat evaluasi 10 tahun berjalannya “Samkai”. Ceritera lain berasal pula dari P. Vriens, MSC kepada penulis pada 1977 di Wendu bahwa oleh orang Marind P. Verschueren, MSC dijuluki “*Amay*”, “pembuka jalan”.

²Kecuali sejumlah warga Marind yang tinggal di Kampung Payum wilayah Kelurahan Samkai, adalah warga Marind yang berasal dari Distrik Okaba.

keadaan *Marind anim* sebagai *Anim ba* atau manusia sejati, dalam situasi yang terus berubah?

Untuk mengembangkan permasalahan di atas diskusi melalui tulisan ini penulis awali dengan menjelaskan tentang Marind dalam perubahan, dilanjutkan dengan pokok Marind Samkai dalam pembangunan, sesudah itu dibahas mengenai masalah partisipasi orang Marind dalam pembangunan di Samkai, Faktor-faktor pendukung, persoalan bingkai partisipasi, kendala-kendala partisipasi dan akhirnya dibuatkan sebuah kesimpulan atas seluruh tulisan ini.

***Marind-anim* dalam Perubahan**

Pokok mengenai *Marind-anim* dalam perubahan hanya berkaitan dengan penelitian tentang perubahan yang dialami *Marind-anim* di Keluهران Samkai. Perubahan dimaksud mulai dialami *Marind anim* ketika “orang asing” datang, tinggal, hidup dan bekerja di daerah ini. Yang dimaksud dengan “orang asing” dalam tulisan ini adalah semua “pendatang” yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang kemudian disebut “*Pu-anim*”.³ Kontak dan komunikasi secara tetap antara *Marind-anim* dengan “*Pu-anim*” atau “pendatang”, berlangsung pada akhir abad ke-19 dan berlanjut pada abad ke-20, hingga saat ini (Garnaut & Manning, 1979: 16-27). Uraian tentang perubahan yang dialami *Marind-anim* di Merauke dan sekitarnya sejak pos pemerintah Belanda dibuka tahun 1902, secara sekilas akan dilihat dari awal abad ke-20.

Sebagaimana dicatat oleh Djopari (1993: 26-29), *Nederland Nieuw Guinea*⁴ pada tanggal 27 Desember 1949 ditetapkan oleh Ratu Belanda

³Bagi *Marind-anim* dikenal kata *Pu-anim* yang dipakai untuk menyebut orang yang bukan Marind. Kata ini berasal dari masa lalu, sebagai julukan pertama-tama bagi pencari burung kuning yang bersenjata, dengan bunyi tembakan, “Pu, pu...” Dari sana kemudian muncul kata “*pu-anim*” yang diidentikkan dengan “pendatang”. Dengan demikian, *Pu-anim* adalah mereka, pendatang (sebagai *out-group*), dan *Marind-anim* adalah kita (sebagai *in-group*).

⁴Dalam makalahnya, Kuruwaib (1989: 4) menyebutkan beberapa hal terkait dengan kekuasaan bangsa asing di Irian. Tahun 1660, Belanda membuat perjanjian dengan Sultan Tidore untuk memperluas wilayahnya di sebelah Timur Maluku, karena Belanda mengakui kedaulatan Sultan Tidore atas kawasan Timur termasuk pulau Irian. Padahal di Belanda, orang Belanda masih mengakui bahwa pulau Irian merupakan milik Spanyol. Maka untuk memastikan kedudukan Pulau Irian, tahun 1714, Belanda dan Spanyol mengadakan persetujuan Utrecht, yang mana Pulau Irian diserahkan Spanyol kepada Belanda, namun Belanda tidak berbuat apa-apa sehingga memengaruhi Spanyol dan Inggris berkeinginan merebut pengaruh di Irian dalam rangka menguasai Nusantara. Akibatnya, tahun 1770

dengan sebuah ketentuan yang disebut *Besluit Bewindsreggeling Nieuw Guinea*, untuk memberikan wewenang kepada Gubernur menyelenggarakan peraturan ketatanegaraan baru di seluruh wilayah *Nederland Nieuw Guinea* atau wilayah Papua bagian Belanda. Maka, dibentuklah enam *afdeling*, yang mana Merauke, Mappi, Boven Digoel, Asmat, Moejoe menjadi satu *afdeling*, disebut *Afdeling Zuid Nieuw Guinea*.

“Pendatang” atau “*pu-anim*” hadir di daerah Marind khususnya di wilayah Merauke berlangsung dalam waktu yang berbeda-beda. Pemerintah Belanda pada tahun 1902 mulai menetap di Pantai Selatan Irian setelah Merauke dijadikannya sebagai pos pemerintah⁵ untuk daerah Selatan. Kemudian tahun 1905 menyusul para misionaris Gereja Katolik membuka stasi di Merauke, setelah gagal mengusahakannya tahun 1902 (Haripranata, 1967: 3-4). Kelompok pendatang berikutnya ialah para pedagang, pencari burung cenderawasih. Kelompok ini kebanyakan terdiri dari orang Cina, Melayu, dan Eropa (Overweel, ttt.: 16).

Kehadiran “pendatang” tersebut ternyata memengaruhi keadaan hidup masyarakat *Marind* di sekitar Merauke melalui interaksi yang terjadi sesuai dengan kepentingan para “pendatang” tersebut. Penjelasan berikut diarahkan pada permasalahan realitas *Marind anim* terkait dengan persoalan pembangunan.

***Marind Samkai* dalam Pembangunan**

Pada pembahasan ini, keberadaan *Marind-anim* dalam situasi perubahan ditempatkan dalam konteks pembangunan di Kelurahan Samkai semasa Orde Baru, menjelang akhir abad ke-20. Konteks pembangunan yang akan dibahas dibatasi pada sorotan partisipasi *Marind-anim* dalam pembangunan masyarakat di Kelurahan Samkai. Pengertian partisipasi masyarakat pada tulisan ini dirujuk pada studi yang dibuat James Midgley (1986) dalam rangka pembangunan.⁶

Kapten James Cook menemukan Pulau Irian menuntut hak Inggris, sehingga timbulah konflik dengan Belanda.

⁵Pada tahun 1892, sebenarnya telah dibuka sebuah pos di Kampung Selerika, terletak di pantai sebelah Timur Merauke, tapi karena daerah tersebut tidak aman, maka pos itu ditutup (Haripranata, 1967) dan Overweel, (ttt.: 16).

⁶Tulisan Nordholt (1987) merupakan hasil studi tentang kedudukan dan peran pejabat lokal (camat dan lurah) di tiga Distrik di Jawa Tengah. Studi tersebut berkaitan dengan program pembangunan pemerintah pusat di daerah.



Pokok mengenai partisipasi *Marind-anim* dalam pembangunan masyarakat di sini bukan menyangkut partisipasi seluruh orang Marind di Kabupaten Merauke, tetapi terbatas pada *Marind-anim* yang berada di Kelurahan Samkai khususnya Kampung Buti.⁷ Dikatakan oleh Nico Schulte Nordholt, kata “pembangunan”⁸ sebagai padanan kata “*development*” mempunyai konotasi pertumbuhan. Dalam arti yang lebih teknis, pembangunan disandingkan dengan istilah pengembangan dan mempunyai arti yang lebih kualitatif.⁹ Walaupun Nordholt dalam seluruh uraiannya menggunakan kata pengembangan, penulis tetap memilih kata pembangunan sebagai sebuah pilihan istilah atau kata yang mempunyai makna filosofis sebagai pembangunan berkelanjutan.

Sebelum masuk pada pembicaraan mengenai peluang mana yang memungkinkan orang *Marind* berpartisipasi membangun diri dan kampungnya, terlebih dahulu akan disoroti sejumlah faktor yang disebut sebagai pendorong atau pendukung partisipasi tersebut.

Partisipasi

Menurut Midgley (1986: 13-24) ada banyak definisi tentang partisipasi yang pernah diangkat para ahli dalam diskusi-diskusi tentang masyarakat pada tahun 1971. Partisipasi komunitas dirumuskan sebagai berikut: “*Participations as: The creation of oppurtunities to enable all members of community and the larger*

⁷Samkai ditetapkan sebagai kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 140-502 Tanggal 22 September 1982. Menurut Taliziduhu Ndraha (1991: 3-4), dalam pasal 1 UU No. 5 Tahun 1979, yang dimaksud dengan desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun, kelurahan ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

⁸Menurut Nordholt (1987: 15), di Indonesia perubahan berencana disebut pembangunan. Salah satu kriteria pembangunan yang ditetapkan pemerintah ialah partisipasi penduduk. Untuk perubahan semacam ini, di Indonesia dipergunakan istilah perkembangan.

⁹Dia juga menjelaskan bahwa para ahli di Indonesia, seperti ahli ekonomi dan ilmu politik, menggunakan istilah perkembangan untuk *development* dalam arti lebih kualitatif dan pertumbuhan untuk kemajuan ekonomi. Menurutnya, para ahli menilai bahwa kata pembangunan, telah diberi arti negatif, yakni sebagai semboyan belaka atau diberi arti sempit secara sektoral. Berdasarkan pemahaman demikian maka dibuat pembedaan makna, untuk mengartikan perkembangan yang menyeluruh (Nordholt, 1987: 39).



society to actively contribute to and influence the development process and to share equitably in the fruits of development.”

Rumusan seperti ini, menurut Midgley, merupakan pengertian yang umum dan dapat menimbulkan banyak pertanyaan. Hal itu disebabkan karena orang juga membutuhkan informasi lebih banyak mengenai siapa yang berpartisipasi, apa yang menyebabkan atau mendorong orang berpartisipasi dan bagaimana partisipasi dilakukan. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa yang mendorong terjadinya partisipasi ialah keterbukaan dan perlakuan yang melibatkan masyarakat dalam beberapa hal yaitu, karya-karya pembangunan, bertanggung jawab bersama dan pengambilan keputusan melalui perumusan kebijakan dan perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, Midgley (1986: 27-28) juga menyatakan, terdapat beberapa jenis partisipasi masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh *United Nations* (UN) tahun 1981. UN membedakan tiga jenis partisipasi masyarakat yaitu: (a) partisipasi spontan, (b) partisipasi yang disebabkan oleh sesuatu hal, dan (c) partisipasi yang bersifat paksaan. Partisipasi spontan dan partisipasi yang disebabkan oleh sesuatu hal, muncul karena adanya kesadaran masyarakat dan ada kaitannya dengan persoalan yang dihadapi. Adapun, partisipasi yang terpaksa terjadi karena adanya tekanan dan kekerasan. Namun, ia pun mengakui bahwa ada yang berpendapat, ada pula bentuk-bentuk partisipasi tradisional dalam suatu masyarakat yang terjadi karena kebiasaan dan bersifat *resiprositas* untuk saling menolong.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, yang ingin direfleksikan lebih jauh pada pokok ini ialah bagaimana *Marind-anim* di Samkai memaknai partisipasi dalam pembangunan masyarakat dalam situasi perubahan yang begitu cepat disertai bermacam-macam akibat perubahan tersebut. Di samping itu akan didalami pula tentang hambatan-hambatan apa yang dialami *Marind-anim* untuk berpartisipasi dan mengapa demikian?

Faktor Pendukung Partisipasi

Yang dimaksud dengan faktor pendukung partisipasi di sini ialah berbagai hal atau unsur yang menjadi pendorong orang *Marind Samkai* khususnya warga Kampung Buti terlibat dalam karya-karya pembangunan, ikut bertanggung jawab bersama dan turut serta dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan bersama. Faktor-faktor tersebut tentu berbeda-beda bagi setiap kelompok atau komunitas masyarakat. Bagi *Marind anim* di Kampung Buti, faktor pendukung partisipasi



mereka, misalnya adanya pengaruh heterogenitas penduduk, lembaga adat, peran agama (Gereja) dan peran pemerintah.

Pengaruh Heterogenitas Masyarakat

Heterogenitas (kemajemukan) masyarakat mempunyai berbagai pengaruh terhadap kehidupan bersama suatu kelompok masyarakat. Interaksi masyarakat di Samkai dari berbagai kelompok etnis dan keanekaragaman latar belakang kehidupan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelompok etnis *Marind Samkai*, khususnya orang Marind di Kampung Buti.

Apa yang dilihat sebagai perilaku positif dan bermanfaat dari kelompok masyarakat non-Marind bagi kehidupan *Marind-anim*, misalnya adanya perhatian dan dukungan dalam berusaha, pengorganisasian kelompok, ketekunan kerja, pemanfaatan sumber daya alam, sistem pengolahan tanah (sawah), dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh kemajemukan masyarakat dan aktivitas hidup seperti yang dialami *Marind-anim* di Samkai, dilihat oleh putra-putri Marind sebagai faktor pendukung bagi dirinya jika ingin berkembang. Artinya, pengalaman hidup dalam kemajemukan masyarakat seperti di Samkai merupakan kenyataan dari sebuah pengalaman bermakna karena dari pengalaman baru tersebut *Marind-anim* di Samkai dapat belajar bagaimana mengembangkan diri dan kelompoknya.¹⁰

Pengaruh Lembaga Adat

Lembaga adat di Samkai terdiri dari seorang kepala suku, seorang ketua adat dan penasehat adat, sebagai mitra pemerintah setempat di Samkai. Lembaga ini juga merupakan suatu kekuatan pendorong bagi partisipasi masyarakat Marind di kelurahan Samkai. Dalam situasi perubahan sekarang ini, lembaga tradisional seolah diberi peran ganda membantu pemerintah dan mengurus masyarakat adat. Hal tersebut disebabkan karena di samping peranan lembaga adat membantu pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat adat Marind, lembaga ini juga menjadi motivator bagi masyarakat untuk menggerakkan mereka agar berpartisipasi pada program pembangunan

¹⁰Menurut Simon Ndiken, nelayan Bugis-Makasar dan petani dari Jawa serta guru-guru memberikan contoh yang patuh ditiru oleh Marind kalau ingin berkembang; Hal yang sama dikatakan juga ketika wawancara di Buti tanggal 21 Januari 1994, Pieter Gebze sebagai nelayan Marind yang mandiri setelah beberapa tahun bekerja bersama nelayan Bugis-Makasar di Samkai; wawancara dengan Ny. Oda Mitakda pada tanggal 20 Januari 1994.

kampung. Demikian diungkapkan oleh Apolonarius Mahuze dari Kampung Yowati, kelurahan Samkai.

Pengaruh Agama (Gereja)

Yang dimaksud dengan pengaruh agama (Gereja) di sini ialah pengaruh kekristenan khususnya Gereja Katolik terhadap *Marind-anim* dalam berbagai aspek kehidupan. Pengaruh kekristenan yang langsung dirasakan sebagai pendukung bagi *Marind-anim* dialami melalui kegiatan-kegiatan jemaat secara parokial.¹¹ Pengaruh tersebut ternyata turut memicu semangat *Marind-anim* untuk berpartisipasi dalam pembangunan kampung, mengembangkan kerukunan hidup antarwarga kampung dan kelurahan yang berbeda agama. Selain itu juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berlatar belakang keagamaan dan kekristenan mempunyai andil besar dalam memotivasi masyarakat setempat mengembangkan kehidupan sosial-ekonomi dan pendidikan. Lembaga-lembaga dimaksud ialah Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) untuk bidang pendidikan. Adapun, Delegatus Sosial Keuskupan Agung Merauke, Yasanto (Yayasan Antonius) dan Yayasan Mitra Karya bergerak di bidang sosial ekonomi.¹²

Pendekatan kepada Masyarakat

Menurut Soenarjo, Lurah Samkai saat itu, pendekatan yang tepat terhadap masyarakat untuk mendorong dan meningkatkan peran serta mereka dalam pembangunan desa ialah melalui:

“... pendekatan pribadi (*personal approach*) dan kekeluargaan serta berupaya membentuk lembaga adat, karena dalam lembaga adat terdapat ketua adat, kepala suku dan sejumlah orang tua yang berperan sebagai penasehat dari lembaga adat.”

Dikatakannya pula bahwa pendekatan yang dipakai terhadap masyarakat menentukan keberhasilan tugas kita. Namun, apa yang dirasakan atau dialami oleh warga Marind di kelurahan ini ialah adanya pendekatan terhadap masyarakat yang lebih bersifat formal dan struktural, karena kekuasaan.

¹¹Menurut David Mahuze dan Hendrika Gebze, aktivitas masyarakat di Paroki Buti diatur, direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh umat dan pada umumnya semua warga umat terlibat.

¹²Informasi dari Ny. Theresia Kindem, pengurus YASANTO Merauke pada 4 Februari 1994 di Merauke.



Adapun, pendekatan pihak Gereja setempat, menurut penduduk setempat, lebih bersifat menumbuhkan kemandirian jemaat. Hal ini dilakukan dengan memberi tanggung jawab kepada jemaat setempat untuk merencanakan, mempertimbangkan, memutuskan, dan melaksanakan apa yang dipikirkan baik dan berguna bagi umat dan gereja setempat.

Hal-hal di atas merupakan faktor-faktor yang dapat dikatakan sebagai pendorong atau pendukung partisipasi masyarakat. Dikatakan demikian karena beberapa pendekatan di atas memang dilihat oleh orang Marind setempat sebagai pendukung usaha dan perjuangan mereka mengembangkan diri dan kelompok dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, yang diharapkan ialah keikutsertaan masyarakat dalam karya-karya pembangunan sebagai tanggung jawabnya terhadap keseluruhan hidup masyarakat desa, kelurahan, dan kampung, terlibat langsung dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama. Model partisipasi disediakan ruangnya oleh pemerintah untuk mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan itu, penulis sebut sebagai “bingkai partisipasi”. Maksud “bingkai partisipasi” ialah peluang partisipasi masyarakat, yang sistem dan bentuk partisipasinya telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat ukur keterlibatan serta keikutsertaan seorang warga atau sekelompok orang dalam kegiatan pembangunan masyarakat.

Bingkai Partisipasi

Bagian ini ingin mengulas struktur-struktur yang menentukan Marind anim di Samkai untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kelurahan Samkai, khususnya di Kampung Buti. Struktur dimaksud ialah struktur pemerintah, lembaga adat, PKK, struktur sosial-ekonomi, dan struktur sosial-politik.

Struktur Pemerintah

Salah satu peluang bagi Marind Samkai untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat ditempuh melalui struktur dan sistem pemerintahan.¹³ Struktur dan sistem pemerintahan yang dimaksud di sini ialah struktur dan

¹³Menurut Ndraha (1991: 70), dalam UU No. 5 Tahun 1979 telah ditetapkan apa yang disebut Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Sedangkan Pemerintah Kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan (Lurah) dan Perangkat Kelurahan. Perangkat Kelurahan meliputi Sekretariat Kelurahan (terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Kepala-kepala Urusan) serta Kepala-kepala Lingkungan.



sistem pemerintahan Kelurahan Samkai. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai pemerintahan tingkat Kelurahan Samkai, akan disajikan terlebih dahulu tabel tentang para kepala kampung di Buti.

Tabel 1

Kepala Kampung Buti

Tahun	Nama	Mandor	Keterangan
1940	Wager Mahuze	Witni Kaeize	I
1945	Ivo Jani Mahuze	Pius Ire Ndiken	II
1946	Hendrik Gebze	Pius Ire Ndiken	III
1947	Johanes T Ndiken	Pius Ire Ndiken	IV

Sumber: Hasil Penelitian di Kampung Buti tahun 1994

Data tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa struktur dan sistem pemerintahan di Kampung Buti sudah diatur dalam sistem pemerintahan oleh Pemerintah Belanda. Dari informasi yang disampaikan menjadi jelas bahwa sejak tahun 1940, masyarakat di Kampung Buti sudah dipimpin oleh seorang kepala kampung dan mandor. Sistem pemerintahan kampung ini berlangsung terus hingga zaman Pemerintah Indonesia. Tabel berikut ini merupakan gambaran mengenai para kepala desa dan lurah di Kampung Buti, Kelurahan Samkai.

Tabel 2

Kelapa Desa dan Lurah

Tahun	Kepala Desa	Asal Daerah	Keterangan
1971	Johanes Tapro Ndiken	Marind	Kepala Desa
1987	Paschalis Rettob	Maluku-Kei	Lurah (PNS)
1992	Titus Tanggo	Papua-Muyu	Lurah (PNS)
1992	Herman Maturbongs	Maluku-Kei	Pjs Lurah (PNS)
1993	Soenarjo	Jawa	Lurah (PNS)

Sumber: Kantor Kelurahan Samkai 1994

Dalam penelitian ini tidak disebutkan oleh para informan tentang tokoh-tokoh yang memimpin Kampung Buti setelah tahun 1947 sampai 1970. Namun, dari sumber informasi lain nama tokoh yang berperan dan umumnya disebut para informan adalah Bapak Johannes Tapro Ndiken. Sebagai tokoh masyarakat, Bapak Johannes Tapro Ndiken pernah menjadi

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya dan Kabupaten Merauke.

Struktur pemerintahan tingkat kelurahan dalam tulisan ini dilihat sebagai salah satu “bingkai partisipasi”, karena dalam struktur tersebut, mekanisme yang ada memungkinkan seseorang berperan sesuai dengan kewenangannya, ditetapkan menurut aturan yang berlaku. “Bingkai” ini pula yang menjadi syarat bagi masyarakat bila ingin menjadi bagian dari struktur tersebut. Dalam dan melalui struktur itulah seseorang diharapkan dapat berperan secara kreatif dan bertanggung jawab mengembangkan diri dan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme partisipasi pembangunan seluruh warga dalam arti yang lebih luas. Dari temuan penelitian terlihat bahwa putra-putri Marind juga dapat memenuhi persyaratan struktural pemerintahan tersebut di tingkat kelurahan.

Dalam tabel berikut dapat dilihat sejumlah orang Marind Samkai yang dipercaya berperan sebagai kepala urusan (1 orang), dan staf (2 orang).

Tabel 3

Struktur Pemerintahan Kelurahan Samkai Tahun 1994

Jabatan	Nama	Pendidikan	Asal Daerah
Lurah	Soenarjo	Sarjana Muda	Jawa
Sekretaris	Sanusi	Sekolah Menengah Atas	Jawa
Kaur Pemerintahan	Paulus Gebze	Sekolah Dasar	Marind-Buti
Staf (PNS)	1. Anselmus Kaize 2. Wilhemus C. Gebze	Sekolah Menengah Pertama Sekolah Dasar	Marind-Buti Marind-Buti
Tenaga honor	1. Ndity Albertus 2. Magdalena Masela	Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas	Tanimbar-Maluku Tanimbar-Maluku

Sumber: Kantor Kelurahan Samkai Tahun 1994

Dari penuturan warga masyarakat pada umumnya di Kampung Buti, mereka memandang aparat pemerintah, apa pun jabatannya, sebagai tokoh masyarakat dan diharapkan dapat berperan membantu warga setempat. Namun, dalam kenyataan pada umumnya, perilaku para aparat tersebut,

jauh dari apa yang diharapkan masyarakat.¹⁴ Bila para aparat tersebut berperan dan berperilaku sesuai dengan peran¹⁵ dan fungsinya masing-masing, sesungguhnya hal seperti itu merupakan bentuk partisipasi yang bermakna bagi diri sendiri dan masyarakat lainnya. Namun, dari pengamatan penulis saat penelitian, apa yang diharapkan tidak tampak.

Tabel 3 di atas memperlihatkan bahwa pucuk pimpinan kelurahan bukanlah putra asli Marind dari wilayah Samkai. Lurah dan sekretaris berasal dari luar Papua, bukan orang Marind. Dari sisi pegawai, hanya tiga orang yang berasal dari Marind Samkai dan yang lainnya berasal dari luar Papua. Dari sisi tempat tinggal, lurah tidak tinggal di wilayah Kelurahan Samkai tetapi tinggal di Kota Merauke. Menurut warga masyarakat Kelurahan Samkai, kejadian-kejadian sehari-hari penduduk atau warga tidak diketahui oleh lurah karena ia tidak hidup bersama penduduk di Kelurahan Samkai.

Tabel 4

**Pengurus Rukun Wilayah (RW) dan Rukun Tetangga (RT)
Kelurahan Samkai Tahun 1994**

RW dan RT	Nama Ketua	Keterangan
RW I	Nandrin	Pendatang
RT 1	H. Muntaha	Pendatang
RT 2	Jamaludin	Pendatang
RT 3	D.G Leka	Pendatang
RW II	Sayuti	Pendatang
RT 4	Mudatan	Pendatang
RT 5	Ch. Gebze	Asli Marind
RT 6	Usman Tabu	Pendatang
RW III	A. Endeboy	Papua Non Marind
RT 7	K.G. Ndiken	Asli Marind

¹⁴Menurut Simon Ndiken, aparat kelurahan asal Marind lebih sering di rumah mengurus keperluan pribadi daripada kerja di kelurahan. Hal serupa juga dikatakan oleh salah seorang guru SD di Buti. Menurutnya, rekan-rekan sejawat dari Marind tidak berperan sebagaimana mestinya baik di sekolah maupun di kampung.

¹⁵Status dimaksud sebagai posisi yang ditempati atau didapat seseorang dalam suatu sistem sosial. Sedangkan peran ialah bentuk tingkah laku yang diharapkan sesuai dengan status seseorang (Lih. Mayer, 1972: 24).

RT 8	W. Gebze	Asli Marind
RT 9	C.P Mahuze	Asli Marind
RW IV	W.W. Gebze	Asli Marind
RT 10	Sangkala	Pendatang
RT 11		
RT 12	P. Lamera	Pendatang

Sumber: Kantor Kelurahan Samkai 1994

Dari kepengurusan RW dan RT di Kelurahan Samkai terlihat jelas bahwa warga kelurahan ini mayoritas penduduk bukan orang Marind, melainkan pendatang. Dengan demikian peran kemasyarakatan yang lebih dominan ada di tangan kaum pendatang, bukan ada di tangan orang Marind. Hal ini berdampak pada seluruh dinamika kehidupan dan pembangunan di Kelurahan Samkai, seperti pada aspek ekonomi, pendidikan, budaya, agama dan hak-hak atas tanah, yang memengaruhi kehidupan orang Marind setempat selanjutnya.

Lembaga Adat

Lembaga lain sebagai kendaraan yang memungkinkan masyarakat Marind berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat terjadi melalui pembentukan lembaga adat. Lembaga ini merupakan salah satu struktur sosial masyarakat yang dibentuk pemerintah untuk membantu aparat di desa menangani dan menyelesaikan masalah-masalah masyarakat yang berkaitan dengan adat-istiadat. Di wilayah Samkai struktur lembaga ini terdiri dari kepala suku dan ketua adat, dibantu oleh beberapa orang tua sebagai penasehat. Tapi, dikatakan oleh Apolonarius Mahuze dari Kampung Yewati Kelurahan Samkai, ketua adat dan kepala Suku di Samkai dipilih sejak tahun 1988. Ketika itu mereka semua masih berusia muda, sehingga dalam kenyataan lembaga ini lebih banyak diatur dan dimanfaatkan bila diperlukan ketimbang memberi kemungkinan untuk berperan secara lebih kreatif. Senada dengan Apolonarius, Kasimirus Ndiken dari Buti pun mengungkapkan hal yang sama. Dari pengalamannya, ia melihat bahwa lembaga adat di Samkai tidak berperan sebagaimana diharapkan. Hal itu disebabkan karena lembaga tersebut dibentuk untuk melayani tugas penguasa dan berfungsi hanya bila diperlukan. Dijelaskannya bahwa banyak kegiatan yang dibuat tetapi tidak melibatkan tokoh-tokoh adat setempat, akibatnya banyak rencana dan kegiatan tidak berjalan semestinya. Informasi lain dari Titus Mahuze, Kepala

Kampung Muting, di Distrik Muting saat penulis berada di sana menyatakan, tokoh masyarakat yang menjadi ketua adat dan kepala suku dipilih orang yang sudah tua yang mempunyai pengaruh dan wibawa. Hal ini memperlihatkan ada perbedaan pendekatan dan pemahaman tentang pentingnya peran dan fungsi lembaga adat. Keadaan di Samkai menunjukkan keberadaan lembaga adat dilihat sebagai suatu lembaga yang *subordinatif* terhadap pemerintah sehingga merupakan lembaga yang bersifat formalitas sebagai tanda pelibatan masyarakat adat. Di Muting, lembaga adat dinilai mempunyai peran dan fungsi yang penting sebagai mitra pemerintah dalam rangka pembangunan kampung dan masyarakat setempat.

Dinyatakan oleh Sumitro Maskun (1993: 24), hendaknya pendekatan dan taktik pembangunan masyarakat dilakukan dengan cara-cara yang bersifat *apresiatif*. Maksudnya, dalam mendekati suatu masyarakat, pola hidup yang berkembang dalam masyarakat harus diberi apresiasi. Tampaknya, unsur ini tidak mendapat perhatian sebagaimana diharapkan karena aspek kuasa pejabat formal lebih diutamakan dan lebih menonjol.

Struktur PKK

Organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga merupakan salah satu wadah penggerak dan pembina kaum ibu (perempuan) yang membuat kaum ibu turut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Sesuai dengan peraturan yang ada, kelompok ini dipimpin oleh istri lurah atau istri kepala kampung. Dari laporan Lurah Samkai dan informasi masyarakat, khususnya kaum ibu di Samkai, memang tampak ada aktivitas dan peran PKK yang patut dibanggakan bagi pembangunan masyarakat, khususnya kaum ibu. Namun di balik itu, organisasi ini dinilai oleh perempuan Marind, tidak berfungsi sebagaimana diharapkan. Dinyatakan oleh Wilfrida Ndiken di Buti bahwa organisasi ini belum mampu menghimpun dan mendorong potensi-potensi kaum perempuan desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat karena organisasi ini berjalan hanya menurut kemauan Ketua PKK. Pendapat Wilfrida didukung pula oleh Klementina Mahuze dan Maria Gebze dari Kampung Buti, bahwa pengurus tidak mampu memimpin organisasi dan hanya bergantung pada kelurahan serta pengurus PKK kabupaten serta ada penyalahgunaan dana bantuan pemerintah. Secara lebih tegas lagi dikatakan oleh Xaveria Ndiken, Klementina Mahuze, dan Maria Gebze di Buti bahwa pendekatan terhadap ibu-ibu Marind masih dibeda-bedakan atau bersifat *diskriminatif*. Dikatakan demikian karena pengurus lebih sering melibatkan perempuan dari orang-orang pendatang dan kurang melibatkan perempuan kampung orang asli

Marind. Di samping itu program-program organisasi masih dilaksanakan berdasarkan pada apa yang ditetapkan dari atas. Menurut sejumlah perempuan Marind di Samkai, masuk pada organisasi ini berarti melibatkan diri pada apa yang sudah ditentukan dari atas atau mengikuti apa yang dikehendaki pimpinan organisasi.

Struktur Sosial-Ekonomi

Partisipasi masyarakat dalam bidang kehidupan sosial-ekonomi di Samkai diatur melalui kelompok-kelompok seperti, kelompok Perajin Kulit Buaya, kelompok ibu-ibu dan Kelompok Usaha bersama (KUB). Dari data, terlihat bahwa orang *Marind* pun telah turut terlibat dalam kelompok sosial-ekonomi desa tersebut. Berikut ini disajikan data kelompok-kelompok usaha masyarakat di kelurahan Samkai.

Tabel 5

Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Kelompok	Ketua	Anggota	Tempat
1. KUB I	Sanusi	7 orang	Lampu Satu
2. KUB II	Bernardus T Ndiken	5 orang	Buti
3. KUB III	Willem Waros	5 orang	Yobar
4. KUB IV	Sangkala	5 orang	Payum
5. Usaha Perorangan	M. Nawir	18 orang	Binaloka

Sumber: Kantor Kelurahan Samkai 1994

Usaha ekonomi penduduk melalui kegiatan usaha bersama yang dipimpin oleh orang bukan Marind di Kelurahan Samkai seperti di wilayah Lampu satu, Binaloka, dan Payum, diikuti oleh banyak warga pendatang. Adapun, usaha bersama yang dikelola putra Marind seperti di Buti dan Yobar, pesertanya lebih sedikit. Walaupun demikian sudah tampak adanya usaha ekonomi yang dilakukan oleh orang asli Kelurahan Samkai walaupun belum bisa menyaingi kelompok usaha pendatang yang pada umumnya berasal dari Buton, Bugis dan Makasar.

Selain itu kelompok usaha bersama terdapat pula kelompok perajin kulit buaya di Kelurahan Samkai saat itu. berikut ini disajikan data tentang kelompok perajin dimaksud.

Tabel 6

Kelompok Perajin Kulit Buaya

Nama Kelompok	Ketua	Anggota	Keterangan
Kelompok 1	Samin	3 orang	
Kelompok 2	Lukas	3 orang	

Sumber: Kantor Kelurahan Samkai Tahun 1994.

Berdasarkan informasi yang disampaikan warga, kegiatan tersebut lebih banyak ada di wilayah Kota Merauke daripada di Kampung Buti, karena tenaga terampil atau perajin kulit buaya umumnya berasal dari luar Papua dan pembeli berada di kota atau berasal dari luar Merauke. Selain itu bahan baku usaha kulit buaya berasal dari beberapa tempat di Kabupaten Merauke.

Usaha ekonomi lain yang dilakukan oleh orang asli Buti yang tidak didata oleh kantor kelurahan ialah usaha pencarian siput tiram di laut oleh sejumlah orang yang dilakukan sampai di wilayah perbatasan PNG dengan menggunakan perahu bermotor. Dikatakan oleh salah seorang informan Pelayan Umat di Gereja Paroki Buti bahwa usaha tersebut dilakukan karena harga siput tiram saat itu bisa dijual dengan harga Rp. 50.000,00, bahkan bisa mencapai Rp. 80.000,00 per-kg.

Dalam Tabel 7, penulis menggambarkan aktivitas ibu-ibu di kelurahan Samkai.

Tabel 7

Kelompok Ibu-ibu

Nama kelompok	Ketua	Anggota	Keterangan
1. Dasa Wisma	Ny. Aidar Muntaha	200 orang	Ada 15 kelompok
2. Kelompok Bordir	-	20 orang	
3. Wanita Koperasi	Ny. Odilia	20 orang	
4. Perajin terasi	Ny. Christina		
a. Kelompok Binaloka	-	7 orang	
b. Kelompok Kampung Nowari	Ny. Yosep Apai	5 orang	
c. Kelompok Buti	-	5 orang	

Sumber: Kantor Kelurahan Samkai, Tahun 1994



Dari informasi yang penulis peroleh, kegiatan ibu-ibu pada umumnya dapat berjalan walaupun tidak semua anggota terlibat aktif. Kegiatan dasa wisma umumnya digerakkan oleh pengurus PKK dan istri kepala kampung. Demikian pula kelompok bordir yang aktif melatih ibu-ibu menyulam, berjalan, tetapi tidak banyak melibatkan ibu-ibu asli Marind dari Kampung Buti. Adapun, kelompok perajin terasi aktif, namun tidak selalu memproduksi terasi karena jenis udang terasi tidak selalu dapat ditangkap di laut. Jika saat musim panen udang maka usaha ini biasanya lebih produktif.

Oleh sebab itu, patut dicatat bahwa pembangunan bidang sosial-ekonomi penduduk di kampung ini memperlihatkan beberapa hal:

- Adanya ketergantungan beraktivitas pada kelompok yang terstruktur;
- Adanya ketergantungan dana pada pemerintah;¹⁶
- Terbentuk relasi buruh-majikan antara orang Marind dan warga Bugis-Makassar yang mana majikan menentukan hasil usaha para pekerja;
- Adanya persaingan dalam usaha antara “pendatang” dengan “*Marind-anim*” yang diungguli oleh “pendatang”.¹⁷

Struktur dan mekanisme kehidupan sosial-ekonomi di Samkai memperlihatkan gejala bahwa partisipasi masyarakat digerakkan dari atas (oleh pemerintah) dan masyarakat mulai memperlihatkan adanya keinginan dan kecenderungan terlibat langsung dalam kegiatan sosial-ekonomi karena adanya kebutuhan untuk membangun diri dan keluarga menuju masa depan yang lebih baik. Keinginan untuk membangun kehidupan sosial-ekonomi juga mulai terlihat dalam berbagai aktivitas yang dilakukan putra-putri Marind karena adanya kebutuhan untuk berkembang.

Bagi warga Marind, baik pemerintah maupun masyarakat lain, termasuk lembaga swadaya masyarakat, merupakan pendorong utama untuk meningkatkan partisipasi mereka. Dengan kata lain, kemampuan Marind-anim untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat masih terbatas sehingga dukungan dan bantuan masyarakat lain sangat diharapkan. Hal ini akan dibicarakan lebih lanjut pada bagian kendala partisipasi.

¹⁶Hal ini dinyatakan oleh Simon Ndiken di Buti pada 21 Januari 1995 kepada penulis dan diungkapkan juga oleh Soenarjo (1993: 16-17).

¹⁷Pernyataan ini dibuat oleh Polikarpus Samkakai dari Kampung Payum dan Marinus Kloatubun Pelayan Umat Paroki Buti ketika itu pada tanggal 27 Januari 1994.



Struktur Sosial-Politik

Dikatakan oleh sejumlah informan, peran serta tokoh Marind seperti Yohanes Tapro Ndiken dan lain-lain dalam penentuan nasib Irian Jaya berintegrasi dengan NKRI, tidak dapat disepelekan (Djopari, 1993: 75-76). Dalam perkembangan kemudian, partisipasi *Marind-anim* dalam kehidupan sosial-politik diatur melalui partai politik seperti PDI, Golkar dan PPP. Namun, peran pengambilan keputusan dalam kehidupan sosial-politik masyarakat pada umumnya tidak berada pada masyarakat setempat, khususnya *Marind-anim*.¹⁸ Dalam dinamika kehidupan masyarakat pengaruh aspek sosial politik sering menimbulkan ketegangan dan konflik dalam interaksi masyarakat di Samkai.

Seluruh struktur yang membingkai partisipasi masyarakat dapat dikatakan merupakan kekuatan yang membatasi tapi sekaligus mendorong masyarakat terlibat dalam dunia politik, khususnya *Marind-anim* di Samkai. Akan tetapi faktor-faktor pendorong tersebut di atas dihambat oleh keadaan *Marind-anim* yang dililit oleh sejumlah persoalan mendasar yang belum terpecahkan. Persoalan-persoalan yang dihadapi itu tentu memengaruhi partisipasi mereka di desa baik dalam aktivitas sosial-politik maupun aktivitas lainnya, secara spontan maupun yang didorong oleh kebutuhan mereka.

Partisipasi dalam bidang sosial-politik pada umumnya terlihat sebagai akibat adanya desakan atau paksaan pihak lain. Hal ini tidak berarti bahwa *Marind-anim* di Samkai tidak mengalami perubahan dan perkembangan tetapi perubahan yang dialami menunjukkan perkembangan yang tidak seimbang di berbagai aspek kehidupan mereka. Ketidakseimbangan itu tampak dari tiadanya spontanitas dalam partisipasi masyarakat di Kelurahan Samkai, khususnya di Kampung Buti. Dengan kata lain, kemandirian dan spontanitas untuk berpartisipasi dalam bidang sosial-politik dihambat juga oleh faktor-faktor lain seperti yang akan dibicarakan pada bagian berikut ini.

Kendala Partisipasi

Beberapa aspek yang ingin dilihat sebagai faktor-faktor yang menjadi kendala partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kelurahan Samkai adalah faktor pendidikan dan pengetahuan, faktor sosial-ekonomi, pengaruh faktor sosial-budaya dan faktor stigmatisasi terhadap orang

¹⁸Wawancara dengan John Rahawarin anggota DPRD Kabupaten Merauke, pada 3 Februari 1994 di Merauke.

Marind. Berikut ini penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala partisipasi penduduk di Kampung Buti.

Pengaruh Aspek Pendidikan dan Pengetahuan

Sejarah perkembangan daerah ini mencatat, bahwa sejak tahun 1924 (Haripranata, 1967: 8), di wilayah ini telah ada pendidikan sekolah¹⁹ yang lebih dikenal dengan nama sekolah peradaban atau pemasyarakatan yang didirikan oleh Gereja Katolik. Melihat keadaan daerah ini, dapat dikatakan bahwa pada umumnya putra daerah Marind Samkai, telah menikmati pendidikan sekolah, sekurang-kurangnya pendidikan dasar. Pengaruh tingkat pendidikan dan pengetahuan menjadi salah satu kekuatan bagi manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan hidupnya secara dinamis, kreatif, dan adaptif.

Data pada tabel-tabel berikut memberi gambaran mengenai tingkat keberhasilan putra-putri Marind dalam mengikuti evaluasi belajar tahap akhir pada pendidikan dasar. Tabel 8 melukiskan suatu perbandingan kelulusan peserta ujian akhir pada kelas VI SD, antara Kampung Buti (salah satu kampung di wilayah Samkai) dengan kampung-kampung orang Marind di beberapa desa lainnya.

Tabel 8

Perbandingan Kelulusan Murid SD YPPK di Daerah Marind

Sekolah	Peserta Ujian	Lulus	Tidak Lulus	Kelulusan (%)	Keterangan
1. SD YPPK Buti	16	6	10	62	Kampung Buti
2. SD YPPK Kuper	3	1	2	67	Kampung Kuper
3. SD YPPK Wendu	12	2	10	83	Kampung Wendu
4. SD YPPK Kumbe	5	4	1	20	Kampung Kumbe
5. SD YPPK Kaiburse	12	-	12	100	Kampung Kaiburse
6. SD YPPK Onggari	14	1	13	93	Kampung Onggari
7. SD YPPK Domande	5	3	2	40	Kampung Domende

Sumber: Diolah dari tulisan R.J Meteray (1972: 20)

¹⁹Yang dimaksud dengan pendidikan dan pengetahuan di sini ialah pendidikan formal atau pendidikan sekolah yang memberikan sejumlah bekal pengetahuan dasar pada seseorang. Selain itu, hidup dan pengalaman dapat diartikan sebagai tempat pendidikan atau proses belajar seumur hidup, yang memberikan pengetahuan yang lebih umum kepada seseorang.

Dapat dikatakan bahwa persentase ketidakkululusan putra-putri Marind dari SD YPPK (Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik) di Kampung Buti wilayah Samkai ini sebanyak 62%, pada 1972 merupakan persentase ketidakkululusan yang cukup tinggi. Padahal sampai 1972, populasi penduduk di Samkai dapat dikatakan masih menunjukkan situasi masyarakat yang homogen dan didominasi warga Marind. Itu berarti anak usia sekolah pun pada umumnya adalah anak-anak Marind.

Data berikutnya memberikan gambaran yang lebih aktual tentang perjuangan putra-putri Marind di Samkai menapaki pendidikan sekolah dasar. Gejala yang sedang mengemuka di Samkai ketika itu ialah adanya kesenjangan peserta EBTA dan EBTANAS serta jumlah kelulusan antara kelompok Marind Samkai dengan kelompok masyarakat pendatang atau non-Marind yang berdomisili di wilayah Samkai. Pada Tabel 9 disajikan tabel jumlah Murid Kelas VI SD YPPK Buti di Kelurahan Samkai yang lulus dari tahun 1990/1991 sampai tahun 1993/1994.

Tabel 9

Jumlah Kelulusan Murid SD YPPK Buti, Kelurahan Samkai

Tahun Ajaran	Peserta EBTA/NAS	Anak Marind		Lulus	Tidak lulus	Keterangan
		Lk	Pr			
1990/1991	12	-	2	12	-	10 pendatang
1991/1992	21	3	3	21	-	15 pendatang
1992/1993	23	1	4	22	1	18 pendatang
1993/1994	30	2	4	30	-	24 pendatang

Sumber: Laporan Tahunan SD YPPK Buti, Kelurahan Samkai, Tahun 1990/1991-1993/1994.

Beberapa hal dapat disimpulkan dari keadaan pada data tabel 9 ini. *Pertama*, terdapat peningkatan jumlah peserta EBTA dan EBTANAS di SD YPPK Buti beberapa tahun terakhir, sesuai dengan bertambahnya penduduk serta anak usia sekolah pada desa atau kelurahan Samkai. *Kedua*, semakin bertambahnya “pendatang baru” di Kelurahan Samkai (termasuk anak usia sekolah) dan semakin sedikit jumlah penduduk asli Marind dan anak-anak usia sekolah dari keluarga Marind. *Ketiga*, putra-putri Marind Samkai yang lulus sekitar 4 tahun terakhir ini rata-rata hanya 22% dan persentase terbesar 78% adalah kelompok non-Marind. *Keempat*, jumlah anak perempuan Marind yang lulus lebih banyak dari jumlah anak laki-laki.²⁰

²⁰Sejumlah putra-putri Marind yang dijumpai penulis di beberapa kota di Papua (di luar Merauke) menyatakan bahwa mereka segan kembali ke daerah asalnya karena merasa lebih



Konsekuensi bagi individu yang tidak mempunyai pendidikan dan pengetahuan yang memadai, sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat dapat dikatakan akan menemukan banyak kendala untuk mengaktualisasikan diri berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Salah satu dampak dari kurang berpendidikan dan berpengetahuan, orang akan merasa kurang dihargai dan diterima sebagaimana adanya. Hal itu menyebabkan seseorang merasa segan dan minder berinteraksi dengan individu lain. Akibatnya, akan timbul sikap masa bodoh atau yang dalam bahasa Marind disebut *matuhale* terhadap lingkungannya dengan cara menarik diri dari berbagai aktivitas kehidupan masyarakat sekitarnya. Sikap dingin, masa bodoh (*matuhale*) dan menarik diri inilah yang diperlihatkan oleh *Marind-anim* di beberapa tempat termasuk di Samkai ketika itu.

Pengaruh Aspek Ekonomi

Peralihan sistem ekonomi masyarakat Marind dari usaha-usaha yang bersifat subsisten ke usaha-usaha yang bersifat produktif, tidak banyak berarti. Ketakmampuan di bidang permodalan untuk bisnis, pengetahuan dan keterampilan, menjadikan *Marind-anim* tak mampu bersaing dengan masyarakat lainnya. Dalam keadaan seperti ini *Marind-anim* justru dikondisikan untuk bergantung secara ekonomis kepada para pemilik modal dan tidak mampu berkompetisi dengan masyarakat lainnya. Ketergantungan modal, fasilitas, pengetahuan dan keterampilan berusaha, serta ketidakmampuan berkompetisi, menjadi sasaran perlakuan individu tertentu sebagai subjek dan individu lain sebagai objek.

Dunia ekonomi adalah dunia yang penuh persaingan, dunia yang penuh perhitungan keuntungan sebanyak-banyaknya dan kerugian sekecil-kecilnya. Dunia seperti ini merupakan dunia baru dan asing bagi orang *Marind-anim* yang lebih mengenal sistem ekonomi subsisten, atau sistem ekonomi dari tangan ke mulut untuk memenuhi kebutuhan hidup hari ini. Dalam dunia ekonomi, interaksi saling menguntungkan lebih penting daripada keharmonisan yang merugikan, sehingga interaksi antarpribadi dapat berubah menjadi interaksi antara pemodal dan konsumen. Dunia ekonomi merupakan suatu dunia yang menerobos keterikatan primordial seperti keluarga, klen, suku, daerah, nilai-nilai keharmonisan yang tradisional yang tidak produktif secara ekonomis. Dunia ekonomi, merupakan dunia yang

berkembang dalam pekerjaan dan hidup pribadi lebih aman di rantau daripada di kampung halaman sendiri.





menuntut sikap tanggap, jeli melihat peluang, punya kemampuan material, trampil, tekun berusaha, kerja keras dan terencana, serta penuh perhitungan. Persyaratan-persyaratan ini semua sedang dicari oleh *Marind-anim*, sementara tetangga mitra usahanya di Samkai telah memiliki persyaratan-persyaratan tersebut. Betapa tidak, situasi seperti ini mengakibatkan terjadinya “kesenjangan kronis” atau “kesenjangan abadi”.

Pengaruh Aspek Sosial-Budaya

Dampak transformasi ternyata telah menimbulkan apa yang disebut adanya “kejutan budaya” atau “kejutan masa depan”, sebagai fakta sosial yang menyejarah dalam kehidupan orang Marind Samkai. Menurut Alvin Tofler (1989: 18-19), kejutan budaya terjadi, bila petunjuk psikologis yang telah dikenal, yang membantu seseorang berfungsi atau berperilaku dalam masyarakat, sekonyong-konyong sirna dan diganti dengan yang baru, yang ganjil atau yang tak dapat dimengerti. Gejala kejutan budaya sebenarnya telah melatarbelakangi sebagian besar kebingungan, frustrasi, dan disorientasi masyarakat dan depresi moral penduduk. Keadaan demikian menyebabkan adanya kelumpuhan komunikasi, keliru menafsirkan kenyataan, dan ketidakmampuan untuk menghadapinya. Tofler pun menyatakan, yang lebih gawat dari kejutan budaya adalah “kejutan masa depan”.

Kejutan masa depan merupakan fenomena waktu, hasil dari tingkat akselerasi perubahan yang tinggi dalam masyarakat. Hal tersebut timbul karena masuknya kebudayaan baru terhadap kebudayaan lama dan merupakan kejutan budaya dalam masyarakat tertentu dengan dampak yang lebih buruk. Jadi, kejutan masa depan adalah disorientasi yang membuat pusing, yang diakibatkan oleh tibanya masa depan yang terlalu dini. Dalam kejutan masa depan jutaan umat manusia akan merasa diri mereka semakin “kehilangan orientasi”. Ketika kehilangan orientasi seseorang makin lama makin tidak mampu menghadapi lingkungan secara rasional.

Bagi *Marind-anim* kehilangan orientasi karena keterkejutan itu berkaitan dengan konsep yang berbeda tentang diri dan sesama, waktu, ruang, kerja, cinta, agama, seks, sistem pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Hal-hal itu mengakibatkan hilangnya harapan untuk kembali ke lingkungan sosial yang dikenalnya. Hal ini diperburuk lagi setelah dalam kenyataan yang dialami *Marind-anim* memperlihatkan bahwa kebudayaan baru itu selalu bergolak dan nilai-nilai senantiasa berubah, sehingga mereka semakin kehilangan orientasi nilai. Dengan kata lain, bagi Marind Samkai, konsekuensi perubahan sosial-budaya akibat kejutan budaya dan masa depan ialah datangnya suatu realitas sosial-budaya baru yang merubah





seluruh realitas keberadaan Marind di tempatnya sendiri yang menimbulkan “disorientasi nilai”. Selain itu, gejala keterasingan akibat dominasi budaya baru semakin memberatkan orang Marind Samkai menapaki masa depan yang diidealkannya. Hal ini disebabkan karena realitas sosial-budaya yang baru kini sangat memengaruhi interaksi sosial masyarakat, melalui nilai-nilai dan struktur-struktur baru. Sementara struktur lokal dan nilai-nilainya terabaikan dan atau sekedar sebagai kenangan masa lalu.

Keterkejutan budaya dan masa depan, telah menyebabkan *Marind-anim* mengalami apa yang disebut “depresi moral” (Boelaars, 1986: 175). Depresi moral ini terjadi antara lain, karena transformasi menghadirkan ketidakseimbangan perkembangan antara kebudayaan baru yang dihadapi, dengan apa yang dimiliki oleh *Marind-anim*. Realitas seperti ini justru merupakan persoalan bagi *Marind-anim* yang pada umumnya masih terikat dengan pandangan dan nilai-nilai hidupnya sendiri, sama seperti masyarakat Papua lainnya. Hal itu dapat disimak dari pernyataan hasil studi kasus Oktovianus Mote (1994: 39), sebagai berikut:

“... di balik keberhasilan ..., kita juga menyaksikan porak-porandanya masyarakat desa. Mereka tidak tahu arah perkembangan daerah dan diri mereka di era kemerdekaan ini. Ketika ukuran kemajuan adalah perhitungan ekonomis, orang-orang di Papua senantiasa semakin jauh dari jangkauan pemikiran orang pusat. Bukti adanya gap tersebut terlihat jelas ketika pemerintah mengumumkan desa miskin di Indonesia.”

Cap “Pemalas” dan “Bodoh”

Stigmatisasi (pemberian cap) terhadap *Marind-anim* sebagai manusia “pemalas”, “bodoh”, “hitam”, “keriting”, dan sebagainya, sudah ada sejak awal kontak dengan dunia luar.

Hal ini berkembang dan menjadi predikat bagi *Marind-anim* (dan warga Papua lainnya), yang kemudian memengaruhi interaksi sosial masyarakat satu sama lain, termasuk dengan pihak instansi pemerintah dan kelompok-kelompok lainnya. Akibat cap seperti itu, muncul ketidakpercayaan, keseganan dan keraguan “pendatang” untuk melibatkan dan memberikan tanggung jawab kepada masyarakat setempat. Sebaliknya, cap tersebut membuat orang Marind bersikap antipati, menolak, dan mencurigai setiap orang baru yang berhadapan dengannya.

Diungkapkan oleh Xaveria Ndiken dan Ibu-ibu Marind lainnya, ada kesan dalam Kelompok PKK yang dialami warga Marind bahwa mereka



merasa sering tidak diterima dalam sejumlah aktivitas bersama warga. Hal seperti ini telah menimbulkan sikap tidak puas terhadap kelompok pendatang tetapi juga sikap menarik diri dari aktivitas masyarakat. Di balik pemberian cap tersebut, terkandung sikap arogan “pendatang” yang merasa diri superior dan menganggap warga setempat inferior (Bdk. Suwarsono dan So, 1991: 15). Menurut Alatas (1988: 4), sikap seperti ini merupakan ciri perilaku dan ideologi kolonial yang berkembang di berbagai negara bekas jajahan yang mengandung prasangka kesukuan. Hal ini bagi masyarakat Papua dan khususnya *Marind-anim* merupakan unsur rasial²¹ yang menghambat partisipasi mereka dalam pembangunan masyarakat.

Kesimpulan

Beberapa hal dapat disimpulkan dari studi yang dilakukan di Kampung Buti Kelurahan Samkai. *Pertama*, perubahan sebagai “perangkap” kehidupan. Perubahan yang dialami oleh *Marind anim* merupakan suatu realitas atau lebih tepat disebut suatu fakta sosial yang tak dapat dihindari. Perubahan tersebut dapat dilihat dari perspektif sosiologi interpretatif sebagai sebuah “perangkap” kehidupan, karena secara faktual perubahan yang terjadi membuat *Marind-anim* tak berdaya, terkurung dalam sangkar kebijakan dan kekuasaan agen-agen perubahan. Berhadapan dengan situasi perubahan yang demikian, tidak ada pilihan lain bagi *Marind-anim*, selain harus tunduk, patuh menjalani apa yang dikehendaki, direncanakan, dan diatur oleh agen-agen perubahan bagi dirinya. Perubahan yang terjadi juga merupakan “perangkap” bagi orang *Marind* karena dalam kehidupan yang baru, hak dan kewajiban sebagai *Marind-anim* dicabut dari dirinya. Dalam keadaan demikian orang lain lalu menyatakan diri berhak dan berkewajiban mengatur hidup *Marind-anim*. Kehidupannya yang berlimpah dalam kesatuan yang utuh dengan alam, sesama dan yang ilahi, dipilah-pilah menjadi bentuk-bentuk kehidupan yang parsial.

Nilai-nilai hidup baru yang dibawa oleh agen-agen perubahan harus menjadi pegangan hidup mereka dan bukan nilai-nilai yang diyakini dalam *world view* sebagai *Marind-anim ba*. Dengan demikian perubahan yang memojokkan *Marind-anim* terjadi melalui perilaku-perilaku yang menjadikannya sebagai objek dan kurban pembangunan. Dalam situasi itu interaksi yang terjadi tidak berlangsung dalam relasi antarsubjek. Dengan kata lain, dalam

²¹Wawancara dengan Samuel Oyab (Pimpinan Eksekutif YAPSEL Merauke) 22 Januari 1994. Lihat juga pernyataan Mikael Manufandu (Mantan Walikota Jayapura) dalam Mutiara, No. 777, halaman 12-18, September 1995.

suasana demikian tidak terjadi apa yang dikatakan Berger dan Luckmann (1967), adanya pertukaran subjektivitas antarpribadi karena hubungan yang dibangun bukan hubungan kesetaraan atau kesederajatan antara orang *Marind-anim* dengan agen-agen perubahan sebagai hubungan antarsubjek. Realitas seperti ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya *Marind-anim* telah terperangkap dalam struktur relasi subjek-objek. Dalam struktur relasi seperti ini, *Marind-anim* juga terperangkap dalam relasi yang lebih bersifat *formal-fungsional* daripada relasi yang bersifat *personal-afektif*. Hal ini terjadi karena relasi-relasi akrab dalam kelompok *primer* seperti kelompok keluarga, kelompok sebaya atau serumah, atau sekampung semakin hilang dan diganti dengan relasi dalam kelompok masyarakat yang lebih luas dengan tingkat keakraban yang rendah. Perubahan yang memojokkan itu harus dibayar mahal oleh *Marind-anim* sepanjang hidupnya karena perangkap yang dibuat itu tidak diketahui bagaimana harus dibuka dan struktur keterpojokkan itu seolah-olah telah menjadi struktur kesadaran *Marind-anim* itu sendiri (Bdk. Berger, 1985: 170).

Kedua, *Marind-anim* sebagai “subjek yang terluka”. Dalam situasi terperangkap seperti itu *Marind-anim* ternyata hidup pula sebagai subjek yang terluka atau cacat. Dengan diri yang terluka atau cacat *Marind-anim* tidak lagi mampu tampil sebagai pribadi *Marind-anim* *ha*. Hal itu disebabkan karena menara gading *Marind-anim* *ha* telah direbut dan dihancurkan, sehingga keberadaannya hanya sebagai *Marind* yang telah tercabik-cabik dan sebagai *Marind* yang kehilangan jati diri. Setelah orang *Marind* mengalami cacat, ia pun dipelihara dan dirawat. Tetapi, perilaku perawatan hanya bermakna bagi agen-agen perubahan dan bukan bagi *Marind* karena perilaku tersebut telah merubah seluruh keutuhan hidup yang harmonis dengan sesama, alam, dan yang ilahi. Dalam keadaan yang terluka, *Marind* telah menjadi sasaran perilaku yang bersifat *eksploitatif* dalam berbagai aspek kehidupan. Perilaku eksploitatif seperti itu tentu bukan perilaku yang mempunyai makna sosial bagi *Marind-anim*. Seperti dikatakan oleh Weber (1986: 22-26) bahwa perilaku manusia disebut perilaku sosial bila perilaku itu mempunyai makna bagi orang lain. Artinya, apa yang dilakukan oleh agen-agen perubahan harus diterima dan diyakini oleh *Marind-anim* sebagai perilaku yang berarti bagi diri dan hidupnya. Memang seluruh perubahan yang diprakarsai oleh “pendatang” merupakan tindakan yang rasional atau masuk akal, akan tetapi Weber juga mengatakan, kriteria lain dari perilaku sosial ialah mengutamakan nilai yang hidup dan menjadi pegangan suatu masyarakat dengan mempertimbangkan emosi dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah berurat-akar dalam kehidupan masyarakat. Ketiga unsur yang disebutkan terakhir ini justru diabaikan oleh para pendatang dalam melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan orang *Marind*. Oleh sebab itu,

Marind-anim melihat apa yang dilakukan para agen perubahan tersebut hanya sebagai tindakan sepihak yang merusak dan mencacatkan jati dirinya. *Marind-anim* menjadi subjek yang terluka juga karena mereka dicap sebagai suku bangsa yang rendah, biadab, bodoh, primitif, dan sebagainya. Oleh sebab itu, mereka harus dibentuk dan dijadikan beradab, maju dan sebagainya. Keadaan terluka yang dibuat ternyata tidak dapat disembuhkan oleh yang membuat luka tersebut. Hal itu memerlukan ongkos dan hitungan-hitungan biaya sosial yang tinggi. Dalam keadaan terperangkap dan terluka, partisipasi yang bagaimana yang diharapkan muncul dari *Marind-anim*? Interaksi subjek-objek pada waktu itu tidak memberi peluang bagi kreativitas dan spontanitas sebagai prasyarat bagi partisipasi masyarakat seperti yang dikatakan oleh James Midgley.

Ketiga, Marind Samkai dan masa depan. Tiada pilihan bagi *Marind-anim* untuk belajar dari kegagalan masa lalu guna menyiapkan masa depan yang lebih baik. Hal ini tentu tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh *Marind anim*. *Marind anim* membutuhkan yang lain, yang dapat menopangnya, dengan semangat kemanusiaan dan penghargaan yang tinggi. *Marind Samkai* membutuhkan generasi baru yang dapat mengembangkan hidup orang *Marind*, generasi yang mampu bersaing dan mampu mengaktualisasikan diri berhadapan dengan nilai-nilai baru dalam kehidupannya dan meraih masa depan secara kreatif, dinamis, dan manusiawi. Kalau tidak demikian kelompok masyarakat ini akan menjadi kelompok masyarakat yang terasing di kampungnya dan di negerinya sendiri. Salah satu hal yang dapat dilaksanakan kini ialah melakukan suatu kajian ulang terhadap realitas dan masalah perubahan masyarakat setempat untuk mengambil langkah yang tepat dalam pengembangan masyarakat menyongsong hari depan lebih baik dan semakin pelik.

Apa yang disajikan dalam tulisan ini menggambarkan bagaimana proses perubahan berlangsung dalam kehidupan suatu masyarakat pada tataran lingkungan hidup yang bersifat *mikro*, baik karena pendekatannya yang *akomodatif* maupun yang bersifat *konfrontatif*. Fakta sosio-kultural kehidupan masyarakat yang bersifat *mikro* tersebut ditandai oleh pengalaman interaksi antarindividu dan kelompok berkaitan dengan dinamika pembangunan masyarakat di tingkat kampung. Latar belakang kondisi kehidupan masyarakat yang demikian itulah yang dilukiskan di atas merujuk pada pengalaman hidup orang *Marind* di Kampung Buti, Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke. Dinamika kehidupan tersebut ditandai oleh interaksi dan partisipasi orang *Marind* di Kampung Buti sebagai bagian dari suatu dinamika masyarakat yang sedang membangun di berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan

evaluasi dan refleksi bagi siapa pun sebagai agen perubahan atau agen pembangunan untuk merancang suatu pendekatan yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi sosio-kultural masyarakat, mensiasati perubahan yang sedang terjadi guna menjawab masalah-masalah masyarakat.



Daftar Rujukan

- Aditjondro, George J. dan Kristian Ansaka (*Penyunting*). 1986. *Mendongkrak Kesenjangan Orang Kampung di Irian Jaya. Sebuah Bunga Rampai Usaha-Usaha Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Irian Jaya*. Jayapura: Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya.
- Alatas, S.H. 1988. *Mitos Pribumi Malas. Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina dan Kapitalisme Kolonial*. Jakarta: LP3ES.
- Baal, van J, 1966, *Dema. Description and Analysis of Marind-Anim Culture (South New Guinea)*. Amsterdam: The Hague-Martinus Nijhoff.
- Berger, Peter L. 1982. *Piramida Kurban Manusia. Etika Politik dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES.
- Boelaars, J. 1984. *Kepribadian Indonesia Modern. Suatu Penelitian Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 1986. *Manusia Irian. Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: Gramedia.
- Daeng, H. 1963. "Orang Marind Anim", dalam Koentjaraningrat & H. Bachtiar (*Penyunting*). *Penduduk Irian Barat*. Djakarta: Penerbit Universitas Djakarta.
- Djopari, R.G. John. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Durkheim, Emile. 1965. *The Elementary Forms of the Religious Life*. New York: The Free Press.
- Garnaut, Ross dan Chris Manning. 1979. *Perubahan Sosial-Ekonomi di Irian Jaya*. Jakarta: Gramedia.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haripranata, H. 1967. *Ichitisar Kronologis Sedjara Geredja Katolik Irian Barat. Djilid I*. Sukarnapura: Pusat Katolik.

- _____. 1969. *Ichthisar Kronologis Sedjara Geredja Katolik Irian Barat. Djilid II*. Djayapura: Pusat Katolik.
- Kuruwaib, A. 1989. *Sekelumit Data Sejarah Nasional di Merauke*. Merauke: tanpa penerbit.
- Locker, W.G. 1978. *Transformation and Tradition, and Other Essays*. Leiden: The Hague-Martinus Nijhoff.
- Maskun, Sumitro H. 1993. *Pembangunan Masyarakat Desa. Asas, Kebijakan, dan Manajemen*. Yogyakarta: Media Widya Mandala.
- Mayer, Robert R. 1972. *Social Planning and Social Change*. Englewood Cliffs, London: Prentice-Hall Inc.
- Meteray, J. R. 1972. *Marind 70 (Tujuh Puluh) Tahun dalam Proses Akulturasi, Studi tentang Latar Belakang Keadaan Masyarakat Marind*. Merauke: tanpa penerbit.
- Midgley, James (cs.). 1986. *Community Participation, Social Development and the State*. London and New York: Methuen & Co. Ltd.
- Mote, Oktavianus. 1994. *Transformasi Budaya Orang Irian. Studi Kasus Suku Mee*. Salatiga: Bina Darma No. 44.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nordholt, Schulte Nico. 1987. *Ojo Dumeb. Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Overweel, Jeroen A. (tanpa tahun terbit). *Suku Marind dalam Alam dan Lingkungan yang Berubah, Sebuah Studi tentang Perubahan Sosial-Ekonomi dalam Masyarakat Suku Marind untuk Membantu Merumuskan Strategi Jangka Panjang*. Merauke: Yayasan Pengembangan Sosial-Ekonomi dan Lingkungan Hidup (YAPSEL).
- Patay, Martin (dkk.). 1987. *Buatlah Mereka Lebih Betah di Kampungnya. Suatu Studi Rona Awal tentang Penduduk di Kecamatan Senggi, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya*. Jayapura: Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya.
- Sastrapratedja, M. (Ed.). 1986. *Menguk Mitos-Mitos Pembangunan. Telaah Etis dan Kritis*. Jakarta: Gramedia.
- So, Y. dan Suwarsono. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.



Soenarjo. 1993. *Laporan Umum Kelurahan Samkai dalam Rangka Rakorcam Gerbangsadu*. Merauke: Kelurahan Samkai.

Toffler, Alvin. 1989. *Kejutan Masa Depan*. Jakarta: Pantja Simpati.

Veeger, J. K. 1986. *Realitas Sosial. Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia.

Weber, Max. 1986. *Economy and Society. An Outline of Interpretative Sociology. Volume I*. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. California: University of California Press.

